

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki periode krisis multidimensional sejak pertengahan 1997 akibat dari krisis ekonomi di Thailand.¹ Krisis yang bermula di Thailand ini kemudian menyebar dengan sangat cepat ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, melalui mekanisme penularan keuangan yang kuat, sehingga terdapat korelasi langsung antara krisis di Thailand dan krisis yang terjadi di Indonesia. Setelah Thailand mengambangkan baht pada Juli 1997, nilai tukar rupiah mulai tertekan dan terus melemah tajam, yang kemudian memicu krisis ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.² Situasi ini memicu ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto terkhusus kepada Golongan Karya (Golkar) yang telah lama menjadi pilar utama rezim Orde Baru menghadapi tekanan besar baik dari dalam maupun luar partai. Beberapa peristiwa seperti Krisis Ekonomi, Krisis Kepercayaan terhadap Soeharto karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta desakan para mahasiswa merupakan faktor berakhirnya Orde Baru.³ Golkar sebagai organisasi sosial politik yang dulunya mendukung penuh kekuasaan Soeharto sejak pemilu 1971, turut memainkan peran signifikan dalam mendorong perubahan politik menuju reformasi pada tahun 1998.

¹ Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC Mandiri, Tahun 2006, hlm. 32.

² Kurnia, A. D., Novitasari, L., Nurhaliza, R. S., Mukjizati, S. M., & Syahputri, Y. Pengaruh Kolapsnya Kurs Baht Thailand Terhadap Krisis Mata Uang di Asia 1997. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 4(2), hlm. 59.

³ Tim CNN. *Sejarah Singkat Orde Baru: Latar Belakang dan Penyebab Jatuhnya*. Jakarta: CNN Indonesia, Tahun 2023.

Golkar adalah organisasi yang berasaskan Pancasila serta Undang -undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan cita-cita Bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Golongan Karya merupakan gerakan pembaharuan dan pembangunan disegala bidang dengan landasan Program perjuangan karya dan kekaryaan, yang mendasarkan pada kemasyarakatan, jenis kerja dan lingkungan kerja.⁴

Golkar memiliki tiga kekuatan pada masa kepemimpinan Harmoko, yaitu Kelompok B.J. Habibie, Kelompok Militer, dan Kelompok Cendana.⁵ Kelompok militer sering melontarkan kritik bahwa kepemimpinan Harmoko dinilai lebih berpihak pada kelompok Habibie. Dinamika tersebut merupakan sebuah awal yang memicu perpecahan Internal, akibatnya elit Golkar terbelah menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang masih loyal kepada Soeharto, yang sebagian besar terdiri dari anggota Golkar yang memiliki hubungan langsung dengan kekuasaan Orde Baru seperti Edi Sudrajat.⁶ Kelompok ini berpendapat bahwa mundurnya Soeharto akan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan politik yang lebih besar dan bahwa anggota legislatif tidak harus tunduk kepada tuntutan massa, sedangkan yang kedua merupakan kelompok reformis yang terdiri dari Harmoko, Habibie, Ginanjar, dan Marzuki Darusman. Mereka mulai memahami bahwa mempertahankan Soeharto lebih lama lagi hanya akan memperburuk situasi dan merugikan Golkar di masa depan.⁷ Kelompok ini menekankan pentingnya

⁴ DPP Golkar, *20 Tahun Golkar*, hlm. 106.

⁵ Burhanuddin N, *Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar*, Jakarta: RMBOOKS, Tahun 2007, hlm. 39.

⁶ Ibnu Alkhatab, U. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak, Tahun 2009, hlm. 54.

⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

perubahan politik yang cepat dan mendalam untuk merespons tuntutan masyarakat yang semakin lantang dan juga menyadari bahwa Golkar sebagai organisasi sosial politik ingin tetap relevan dalam era awal Reformasi, Golkar melakukan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik baru yang lebih demokratis dan terbuka. Kelompok ini lebih cenderung memenuhi tuntutan mahasiswa yang ingin reformasi segera dilaksanakan dan menurunkan Soeharto demi kebaikan bangsa secara keseluruhan.⁸

Alasan utama perpecahan internal Golkar yang terbelah menjadi dua kubu tersebut yaitu adanya perbedaan pandangan di antara elit partai terkait bagaimana mereka harus bersikap di tengah krisis nasional yang sudah dirasakan sejak tahun 1997. Tokoh Golkar yang terlibat dalam pemerintahan dan menjadi loyalis Soeharto masih bersikap konservatif dan berusaha mempertahankan status quo. Kelompok loyalis merasa bahwa Soeharto masih merupakan simbol stabilitas, meskipun semakin jelas bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya sudah sangat menurun. Kelompok reformis menjadi antitesa dari kelompok loyalis dan cenderung memenuhi tuntutan mahasiswa agar Soeharto lengser.⁹ Pihak reformis ini mulai meragukan kelangsungan kekuasaan Soeharto dan menganggap bahwa perubahan politik tidak bisa dihindari dan berpendapat bahwa demi kelangsungan Golkar dan posisi politik mereka di masa depan, maka Golkar harus menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi dan mulai menjauh dari Soeharto.

⁸ Burhanuddin N, *Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar*, Jakarta: RMBOOKS, 2007, hlm. 45.

⁹ *Ibid.*, hlm. 45

Golkar tidak bisa mengabaikan demonstrasi yang terjadi sebagai tekanan eksternal untuk menuntut Soeharto mundur, demonstrasi tersebut menjadi salah satu gerakan yang paling vokal dalam menuntut reformasi total. Tuntutan ini bukan hanya berasal dari kalangan oposisi, tetapi dari berbagai elemen masyarakat yang kecewa dengan kinerja pemerintahan. Tekanan eksternal ini memaksa Golkar untuk mempertimbangkan posisi mereka untuk mendukung Soeharto atau mulai merespons tuntutan masyarakat. Situasi politik di Indonesia semakin memanas pada bulan Mei 1998. Tuntutan terhadap reformasi terus meningkat seiring memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim tidak mampu mereformasikan diri.¹⁰ Golkar berada dalam dilema besar dalam waktu yang bersamaan. Dukungan terus-menerus terhadap Soeharto dapat mengancam kelangsungan partai di era pasca-Soeharto, tetapi menjauhkan diri dari Soeharto terlalu cepat juga dapat menciptakan kesan ketidaksetiaan. Beberapa tokoh kunci Golkar, termasuk Harmoko, Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita mulai menyarankan agar Soeharto mundur demi kebaikan bangsa dan kelangsungan pemerintahan.

Keputusan Golkar untuk mendukung atau menjauhkan diri dari Soeharto sangat berpengaruh dalam menentukan arah transisi politik di Indonesia. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Golkar akhirnya mengambil sikap yang lebih realistis. Beberapa tokoh senior Golkar mulai menyarankan agar Soeharto mengundurkan diri dengan cara yang damai dan terhormat. Mereka menyadari

¹⁰ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 -2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Tahun 2007, hlm. 689.

bahwa mempertahankan Soeharto hanya akan memperpanjang krisis dan mengancam stabilitas nasional. Peran Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998 bukanlah sesuatu yang bersifat hitam-putih. Golkar sebagai organisasi politik yang selama ini mendukung Soeharto menghadapi dilema besar di tengah krisis nasional. Setelah jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru, yang menjadi patron politik Golkar, kelompok politik terbesar ini tampaknya kehilangan dasar politik dan arahnya.¹¹ Golkar juga ingin mempertahankan stabilitas politik dan menjaga posisi mereka dalam pemerintahan pada kondisi yang sama. Namun, Golkar juga harus merespon tuntutan reformasi yang semakin mendesak. Kekuatan-kekuatan politik harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga akibat dari Peran Golkar dalam proses transisi politik ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia tahun 1998.

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998, khususnya bagaimana strategi, aksi, dan dampak yang ditimbulkan oleh Golkar dalam proses transisi politik tersebut. Kajian ini penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada jatuhnya Soeharto dan kemunculan partai baru, sementara peran Golkar sebagai organisasi politik dominan yang bertransformasi selama masa transisi masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, Peneliti menaruh perhatiannya untuk mengungkap peran Golkar yang berhasil bertahan di tengah perubahan besar dengan judul penelitian “Peran Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998”. Pendekatan ini memberikan perhatian khusus

¹¹ Ridha, M. Dilema pelembagaan partai golongan karya (golkar) di tingkat lokal: fenomena politik klan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), Tahun 2016, hlm. 174.

pada dinamika internal organisasi sosial politik dan interaksinya dengan aktor politik lainnya akan menganalisis secara mendalam bagaimana Golkar, melalui perpecahan internal dan tekanan eksternal, akhirnya memainkan peran penting dalam politik Indonesia tahun 1998.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Golkar dalam Politik Indonesia Tahun 1998?” yang diuraikan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998?
2. Bagaimana aksi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998?
3. Bagaimana dampak aksi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memaparkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan strategi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998.
2. Mendeskripsikan aksi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998.
3. Mendeskripsikan dampak aksi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat secara teoritis, praktis, dan empiris sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan historiografi yang berhubungan dengan peran Golkar dalam politik Indonesia

tahun 1998, Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan, terutama dalam bidang sejarah politik.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini bermanfaat untuk referensi pemerintah sebagai sumber membuat kebijakan, sumber refleksi partai politik, dan memberikan gambaran kepada akademisi tentang peristiwa politik pada awal reformasi.
3. Kegunaan empiris, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk studi lanjutan tentang evolusi historiografi Golkar pada awal reformasi.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

a. Teori Kekuasaan

Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹² Pembagian ini dikenal sebagai *Trias Politica*, yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dengan memastikan bahwa tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Konsep ini diuraikan dalam karya *The Spirit of Laws* (1748) yang menekankan mengenai pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan dan tirani. Menurut prinsip Montesquieu, independensi hanya dapat dipertahankan jika masing-masing kekuasaan mempunyai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada satu orang atau badan yang memegang ketiga fungsi tersebut.¹³ Sebelum Amandemen ada 6 (enam) yaitu: MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA.

1. Kekuasaan Legislatif

¹² Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, (01), 2022, hlm. 2.

¹³ *Ibid.* hlm. 3.

Menurut Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, mengenai dua lembaga perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua lembaga ini dianggap sebagai badan legislatif.¹⁴ Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang.

2. Kekuasaan Eksekutif

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada warganya.¹⁶ Lembaga yudikatif bertugas memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh negara maupun individu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Golkar pada era Orde Baru mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai partai dominan, Golkar berperan sebagai alat mobilisasi dukungan politik untuk Soeharto, yang memegang kendali ganda sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Presiden. Struktur ini menciptakan integrasi kekuasaan eksekutif-legislatif, di mana Golkar di DPR/MPR berfungsi sebagai "stempel" kebijakan rezim. Namun, pada 1998, tekanan

¹⁴ Munir, E., & SH, M. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Tahun 2005, hlm. 13.

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, Tahun 1981, hlm. 156

reformasi memaksa Golkar mengadopsi strategi realistis dengan mendorong transisi kekuasaan, meski tetap berusaha mempertahankan pengaruh melalui *reshuffle* kabinet dan kooptasi elite. Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap tuntutan pemisahan kekuasaan, meski belum sepenuhnya sesuai dengan ideal *Trias Politica*.

b. Teori Hegemoni

Hegemoni berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).¹⁷ Artinya hegemoni dapat menunjukkan sebuah dominasi yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yaitu dominasi antar pemerintah di suatu negara. Antonio Gramsci merupakan seorang filsuf dan teoretikus politik Italia yang dikenal karena pengembangan teori hegemoni, yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan mereka dalam masyarakat. Teori ini merupakan bagian dari analisis Marxis yang lebih luas, tetapi Gramsci memperluas konsep tersebut dengan menekankan pentingnya aspek budaya dan ideologi dalam dominasi sosial. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah kesepakatan di mana kelas yang terhegemoni menerima ideologi kelas yang menghegemoni dan menghasilkan ketertundukan.¹⁸ Kata hegemoni sebelum Gramsci sudah dipakai oleh Plechanov, Lenin, dan Axelrod untuk menunjukkan kekuasaan politik proletariat, misalnya apabila berkoalisi dengan kaum tani.¹⁹

¹⁷ KBBI, diakses pada 29 Januari 2025. /kbbi.web.id/hegemoni

¹⁸ Siswati, E. Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1) Tahun 2017, hlm. 26.

¹⁹ Franz Magniz-Suseno, *Dalam Bayang-Bayang Lenin*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2003, hlm. 188.

Gramsci memperluas pemahaman Lenin tentang hegemoni sehingga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan negara.²⁰ Gramsci mengartikan hegemoni sebagai kepemimpinan moral dan intelektual oleh kelas yang berkuasa, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau paksaan, tetapi juga pada pengendalian ideologi dan budaya.

Gramsci membedakan tiga tingkatan hegemoni:

1. Hegemoni Total, ditandai dengan kesatuan moral dan intelektual yang kuat di masyarakat.
2. Hegemoni yang Merosot, muncul potensi konflik meskipun sistem tampak stabil; masyarakat tidak sepenuhnya selaras dengan pemikiran dominan.
3. Hegemoni Minimum, merupakan bentuk paling rendah dari hegemoni, bergantung kepada ideologi antara elit ekonomi, politik, dan intelektual.²¹

Teori hegemoni Gramsci memiliki keterkaitan yang menjadi titik analisa dalam penelitian ini mengenai hubungan kekuasaan Golkar dan dominasi yang dicapai melalui mekanisme persetujuan dari berbagai kekuatan sosial politik yang ada di masyarakat. Golkar selama Orde Baru menerapkan hegemoni melalui kontrol ideologis yaitu Pancasila sebagai alat legitimasi dan dominasi struktural dengan dukungan birokrasi, militer, serta jaringan desa. Harmoko, sebagai Menteri Penerangan, memainkan peran kunci dalam membangun konsensus melalui narasi stabilitas dan pembangunan. Namun, hegemoni ini mulai retak pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. Kelompok reformis Golkar seperti Akbar

²⁰ *Op. cit* hlm. 16.

²¹ *Op.cit* hlm. 22.

Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita melakukan revolusi pasif dengan menggeser dukungan dari Soeharto ke Habibie, menunjukkan peralihan hegemoni dari loyalis Orde Baru ke elite reformis.

c. Teori Struktural Fungsional

Menurut teori fungsional struktural, keteraturan lebih ditekankan daripada konflik dan perubahan dalam masyarakat. Teori ini menganggap masyarakat sebagai sistem yang stabil dengan tujuan mencapai keseimbangan.²² Tokoh sosiologi terkemuka yang memiliki gagasan tentang teori struktural fungsional adalah Merton. Konsep fungsi nyata dan fungsi tersembunyi diperkenalkan oleh Merton. Dalam hal analisis fungsional, kedua frasa ini memberikan kontribusi yang signifikan. Fungsi yang disadari dan diharapkan, atau konsekuensi obyektif yang membantu penyelesaian atau adaptasi sistem dan didasari oleh pihak yang terlibat dalam sistem, disebut fungsi nyata.²³

Fungsi tersembunyi adalah fungsi yang oleh partisipan tidak disadari dan tidak diharapkan. Merton menggaris bawahi gagasan bahwa institusi sosial memiliki fungsi tersembunyi yang dapat positif atau negatif, dan berbeda dari tujuan nyata mereka.²⁴ Fungsi nyata dan fungsi tersembunyi akan menjadi suatu hal yang penting dalam menganalisis apa sebenarnya fungsi nyata yang diharapkan dan fungsi tersembunyi yang tidak diharapkan dari Peran Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998. Merton mengkritik hal yang dilihatnya sebagai tiga postulat

²² Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi, Jilid I Edisi keenam*; alih bahasa: Aminudin Ram, Tita Sobari, Jakarta: Erlangga. hlm. 18.

²³ George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosial Modern*. Jakarta: Kencana Perenada Group. Tahun 2010. hlm. 141.

²⁴ *Ibid.*

dasar analisis fungsional. Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat, suatu keadaan berdasarkan pada sistem sosial yang bekerja sama dan menyatakan bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah ditetapkan dapat berfungsi untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu dan masyarakat.²⁵ Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini karena fakta bahwa orang-orang dalam masyarakat tertentu dapat melakukan hal-hal dengan baik, tetapi orang-orang dalam masyarakat lain mungkin tidak melakukannya. Menurut Merton, ketertarikan manusia terhadap fungsi-fungsi positif tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan elemen disfungsi. Selain itu, Merton juga menyatakan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi kelompok secara keseluruhan, oleh karena itu batas-batas kelompok yang dievaluasi harus dibahas secara mendalam.

Postulat kedua adalah fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama. Sebagai bagian dari teori fungsionalisme universal, setiap bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi yang menguntungkan.²⁶ Teori Struktural Fungsional memperkenalkan konsep difungsi maupun fungsi positif, beberapa perilaku sosial jelas ada yang bersifat disfungsional. Merton menganjurkan elemen-elemen budaya harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif dan negatif. Ketiga adalah postulat *indispensability*,

²⁵ *Ibid*, hlm. 137.

²⁶ *Ibid*.

menyatakan bahwa dalam setiap jenis peradaban, setiap tradisi, konsep, objek material, dan kepercayaan melakukan beberapa peran penting, melakukan sejumlah tugas, dan merupakan bagian penting dari operasi sistem secara keseluruhan.²⁷ Merton berpendapat postulat ini masih kabur, belum jelas apakah fungsi suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota baru atau norma yang merupakan suatu keharusan.

Merton berpendapat bahwa diferensiasi sosial mengacu pada perbedaan posisi sosial yang tidak menimbulkan hierarki, sedangkan stratifikasi sosial adalah perbedaan posisi yang bersifat hierarkis. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan penempatan sosial seringkali menjadi masalah karena ada posisi yang lebih diinginkan daripada yang lain.²⁸ Struktural Fungsional memiliki arti bahwa Setiap posisi dalam masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Posisi sosial yang berbeda membutuhkan bakat dan kemampuan yang berbeda pula, dan setiap posisi harus diisi oleh individu yang sesuai dengan harapan masyarakat.²⁹ Fungsi dari struktural fungsional dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis elemen yang berada di lingkungan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan fungsi dari sebuah sistem politik yang sudah ada.

d. Teori Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan.³⁰ Gerakan sosial yang bermacam-macam motifnya selalu memiliki berbagai alasan

²⁷ Robert K. Merton. *On theoretical sociology*. New York: the Free Press. 1967. hlm. 86

²⁸ Merton, Robert K. (2002). *Teori Sosiologi dan Struktur Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 185.

²⁹ Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 234

³⁰ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016, hlm. 21.

dan hampir selalu menyebabkan perpecahan atau konflik. Teori Konflik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori konflik dari Ibnu Khaldun. Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, Teori konflik berakar pada konsep *ashabiyyah* (solidaritas sosial) yang merupakan perekat utama kekuatan sosial-politik dalam masyarakat. *Ashabiyyah*, yang berasal dari kata "*ashaba*", yang berarti "mengikat", secara fungsional mengacu pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial tertentu.³¹ Dengan demikian, *ashabiyyah* menurut Ibnu Khaldun bukan sekadar bentuk solidaritas biasa, melainkan fondasi utama yang menentukan keberlangsungan, kekuatan, dan dinamika kelompok sosial. *Ashabiyyah* berperan sebagai energi penggerak yang mampu menyatukan individu-individu dalam satu kelompok, sehingga mereka memiliki tujuan, kepentingan, dan identitas bersama. Ketika *ashabiyyah* dalam suatu kelompok kuat, kelompok tersebut cenderung mampu bertahan, berkembang, bahkan mendominasi kelompok lain. Sebaliknya, melemahnya *ashabiyyah* akan menyebabkan disintegrasi, perpecahan, dan akhirnya kemunduran kelompok tersebut.

Ibnu Khaldun menilai konflik yang sering terjadi di masyarakat ini berdasarkan fakta bahwa manusia tidak dapat menghindari hawa nafsunya. Nafsu dapat memunculkan sifat hewani dalam jiwa manusia sehingga berkeinginan untuk mengalahkan dan menguasai pihak-pihak yang sedang menjadi lawannya.³² Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konflik dalam sejarah manusia seringkali disebabkan karena perasaan fanatisme kelompok yang tinggi.³³ Identitas, keyakinan, dan

³¹ Jhon L. Esposito (ed)., *Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I*, Bandung: Penerbit Mizan, Tahun 2001, hlm. 198.

³² Novri Susan. *Sosiologi Konflik*, Jakarta Timur: Kencana, tahun 2019. hlm. 20.

³³ *Ibid.* hlm. 30.

golongan individu mungkin menjadi sumber fanatisme tersebut. Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, menyatakan bahwa *ashabiyyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran tanpa ada *Ashabiyyah*.³⁴

Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Ibnu Khaldun sebagai alat bantu untuk menganalisis ketegangan yang mewarnai Kondisi Internal Golkar yang terlibat dalam proses politik Indonesia tahun 1998. Konflik internal Golkar antara loyalis Soeharto (Edi Sudrajat) dan reformis (Harmoko, Habibie) mencerminkan perpecahan *ashabiyyah* (solidaritas sosial). Loyalis berpegang pada status quo untuk mempertahankan keuntungan, sementara reformis melihat perubahan sebagai jalan menjaga relevansi Golkar. Tekanan eksternal dari demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi mempercepat polarisasi, memicu disintegrasi kohesi internal. Fragmentasi elite Golkar memperlihatkan dinamika *ashabiyyah* Ibnu Khaldun secara nyata yaitu Proses ini menegaskan bahwa ketahanan entitas politik bergantung pada kapasitasnya merekonfigurasi ikatan sosial sebagai respon terhadap perubahan struktural. Pernyataan Harmoko pada 18 Mei 1998 yang mendesak Soeharto mundur menjadi titik puncak konflik, diikuti oleh deklarasi 14 menteri Golkar menolak kabinet reformasi Soeharto. Konflik ini sesuai dengan teori Khaldun bahwa kejatuhan rezim dipicu oleh erosi legitimasi dan fragmentasi elite.

³⁴ Lihat IbnuKhaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), (Bollingen Series Princeton University Press, 1989), hlm. 123-124

1.5.2 Kajian Pustaka

Penulisan sejarah merupakan proses pengisahan atas beberapa peristiwa manusia yang telah menjadi peristiwa masa lampau serta diperlukan kajian pustaka yang menjadi landasan pemikiran untuk dapat memperoleh data-data atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan tiga pustaka utama untuk mendeskripsikan mengenai Peran Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998, yaitu Tulisan Golkar Retak?, Tulisan Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar, serta Tulisan Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia,.

Pertanyaan penelitian pertama tentang strategi politik Golkar di tahun 1998 akan menggunakan pustaka yang ditulis oleh Nanang Dwi Prasdi, dkk. “*Golkar Retak?*” dipublikasikan oleh Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1999. Pustaka ini menyajikan deskripsi dan analisis mendalam mengenai Golkar setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menapaki jalan untuk mempertahankan eksistensinya dengan keretakan yang timbul dalam politik Indonesia. Penulis mengulas berbagai aspek, konflik internal yang terjadi, bentuk-bentuk resistensi yang dihadapi, serta strategi dan kemampuan Golkar dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Pustaka ini mengkaji adaptasi Golkar terhadap perubahan politik dan sosial pasca-Orde Baru. Penulis menyoroti bagaimana organisasi sosial politik ini menghadapi tantangan reformasi, dinamika internal, serta respons terhadap tekanan eksternal. Analisis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang daya tahan dan fleksibilitas Golkar dalam menghadapi perubahan lanskap politik Indonesia yang

menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca umum yang tertarik untuk memahami transformasi Golkar dalam era reformasi.

Pertanyaan penelitian kedua tentang aksi Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998 menggunakan pustaka yang ditulis oleh Napitupulu berjudul *“Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar”* diterbitkan oleh Rakyat Merdeka Books di Jakarta pada tahun 2007. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang dinamika internal Partai Golkar dan peran para tokoh nasional serta elit partai dalam politik Indonesia tahun 1998. Penulis, sebagai salah satu kader terbaik Golkar, memberikan kesaksian sejarah mengenai peristiwa-peristiwa penting yang memengaruhi arah dan ideologi partai tersebut. Melalui perspektif orang dalam, buku ini mengulas bagaimana Partai Golkar membentuk permainan politik pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi dan para elitnya menghadapi tantangan politik pada masa transisi menuju reformasi. Penulis menyoroti keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh para pemimpin partai, serta dampaknya terhadap posisi dan ideologi Golkar dalam lanskap politik Indonesia pasca-1998. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang transformasi ideologi dan strategi politik Partai Golkar selama masa krisis politik Indonesia tahun 1998.

Pertanyaan penelitian ketiga tentang dampak dari segala bentuk tindakan Golkar di tahun 1998 menggunakan pustaka yang ditulis oleh Denny J.A berjudul *“Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia”* diterbitkan oleh LKIS di Yogyakarta pada tahun 2006. Dalam tulisan ini, Denny J.A. menganalisis secara mendalam dampak pengunduran diri Soeharto terhadap peta politik Indonesia,

khususnya peran Partai Golkar dalam menghadapi perubahan tersebut. Sebagai partai yang sebelumnya menjadi pilar utama rezim Orde Baru, Golkar dihadapkan pada tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan era reformasi dan tuntutan demokratisasi.

Penulis mengulas bagaimana Golkar melakukan transformasi ideologis dan struktural untuk mempertahankan relevansinya dalam politik Indonesia pasca-1998. Strategi-strategi yang diterapkan oleh elit partai, termasuk reposisi sikap politik, pembaruan internal, dan adaptasi terhadap dinamika politik yang baru, menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Denny J.A. memberikan perspektif komprehensif tentang peran Golkar dalam transisi demokrasi Indonesia. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan pembaca umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika politik Indonesia setelah era Soeharto, khususnya terkait dengan adaptasi dan strategi partai politik dalam menghadapi perubahan sistem pemerintahan.

1.5.3. Hasil Penelitian yang Relevan

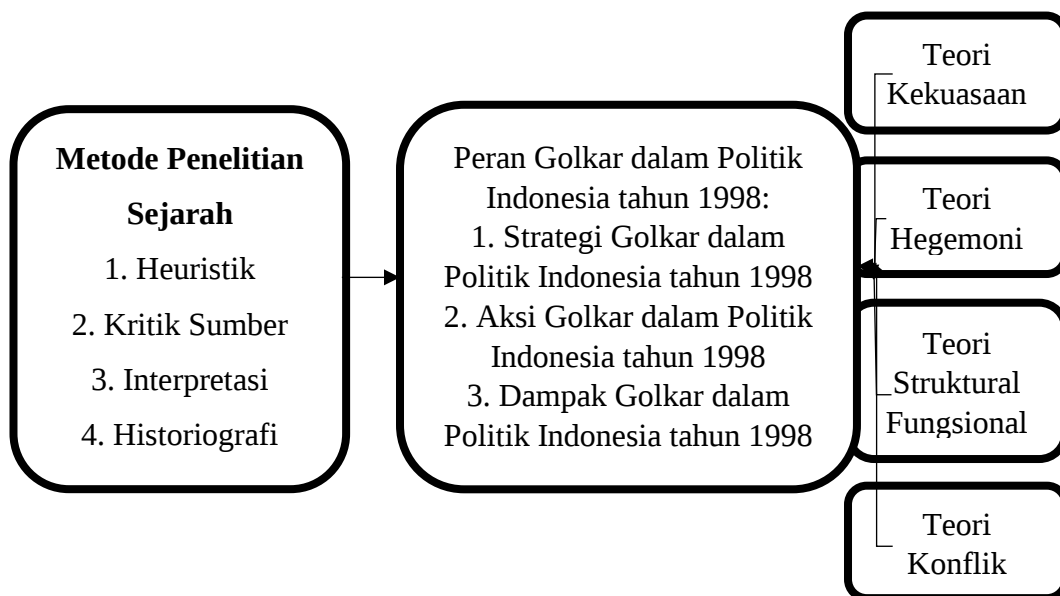
Pertama, Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebuah penelitian yang berjudul *Dinamika Politik Partai Golkar 1998-2004*. Oleh Jatmiko, B. A. (2010). Tulisan ini berkaitan dengan Strategi Politik Partai Golkar pasca Munaslub 1998 serta Konflik internal dan eksternal Partai Golkar. Perbedaan dengan penelitian ini tidak memberikan kajian secara spesifik mengenai konflik internal dan eksternal dan relevansinya sama sama mengkaji perihal strategi golkar dalam menentukan sikap di tahun 1998.

Survey berjudul *The Political Economy of the Indonesian Democratic Transition: A Comparative Perspective*. Asian Survey, 43(6), 936-953. Oleh Mietzner, Marcus. (2003). Tulisan ini berkaitan dengan transisi politik di Indonesia pasca-Soeharto dan peran berbagai aktor politik, termasuk Partai Golkar, dalam proses tersebut. Mietzner menganalisis dinamika kekuasaan yang memengaruhi keputusan politik di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini tidak memberikan kajian secara spesifik mengenai kontribusi Golkar terhadap dinamika politik sebelum Soeharto mengundurkan diri dan relevansinya sama-sama mengkaji dinamika politik tahun 1998.

Penelitian berjudul *Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar)* Oleh Asy Syaukani, G. & Sardini, N. H. (2020). Tulisan ini berkaitan tentang bagaimana DPP Partai Golkar beradaptasi setelah kejatuhan Soeharto dengan memperbarui strategi kaderisasi dan pola pembinaan internal. Fokus utama studi ini adalah pragmatisme Golkar dalam mengelola dinamika internal partai agar tetap eksis di era Reformasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya restrukturisasi organisasi partai sebagai strategi kelangsungan politik, dengan memadukan kaderisasi berbasis loyalitas dan profesionalisme. Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu fokus pada strategi kaderisasi jangka panjang Golkar pasca-1998. Relevansi sama-sama mengkaji adaptasi dan strategi politik Golkar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan besar politik nasional.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sekumpulan ide yang digunakan untuk struktur penelitian, seperti peta, yang dapat mencakup metode, analisis data, tinjauan literatur, dan pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai alat untuk membimbing sebuah penelitian. Kerangka konseptual memberikan gambaran dan pola logis dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah ke rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kerangka konseptual yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.5.4 Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu metode yang dilakukan proses pengujian serta penganalisisan secara kritis mengenai rekam jejak pada masa lampau yang didasarkan pada data dan fakta temuan yang ada.³⁵ metode historis terdiri dari beberapa langkah penelitian yang diantaranya adalah: pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1.6.1 Pemilihan Topik

Pemilihan topik adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini, peneliti menentukan topik yang akan dikaji dengan mempertimbangkan batasan topik atau periode sejarah yang jelas.³⁶ Pemilihan topik sejarah perlu didasarkan pada dua aspek utama: kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.³⁷ Pemilihan topik mengenai Peran Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998, didasarkan pada kedekatan emosional yang timbul dari ketertarikan untuk mengungkap Peran Golkar sebagai objek penelitian untuk bisa dijadikan Penelitian Ilmiah dan diketahui oleh pembaca. Sedangkan kedekatan intelektual terbentuk melalui kajian literatur yang membahas mengenai politik Orde Baru di tahun 1998 dan demonstrasi yang terjadi untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

1.6.2 Heuristik

Heuristik adalah tahapan mengumpulkan, mencari, dan menemukan sumber-sumber yang dipilih berdasarkan kedekatan emosional ataupun intelektual yang

³⁵ Louis G, terj. Nugroho Notosusanto: 1985, 32

³⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013, hlm. 64.

³⁷ *Ibid*, hlm. 70

akan digunakan serta dinilai relevan dengan kajian penelitian³⁸. "Heureskein", kata Yunani yang berarti mencari atau menemukan, adalah asal kata heuristik. Heuristik dalam bahasa Latin disebut sebagai *ars inveniendi* (seni mencari), atau sama dengan istilah Inggris "seni mencari". Teknik yang digunakan dalam penelitian ini relevan dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu. Sistem kartu merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mendokumentasikan segala hal penting yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan dengan topik dari penelitian penulis. Kemudian sumber-sumber tersebut diperoleh dari beberapa buku koleksi pribadi, artikel, jurnal ilmiah yang diterbitkan dan kajian literatur yang sudah penulis analisis. Penulis menggunakan media internet dalam mencari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini yaitu melalui Google cendekia dan Semantic Scholar.

Sumber data terdiri dari dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pelaku sejarah atau dari proses pencarian dokumen dari internal Golkar maupun kalangan di sekitarnya. Penulis mengumpulkan sumber primer yang terdiri dari arsip dokumen peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, arsip majalah, beberapa buku tulisan dan hasil wawancara yaitu:

1. Arsip atau Dokumen:
 - a) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998.
 - b) Pernyataan Pers Ketua DPR/MPR.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71

2. Media Cetak dan Surat Kabar:

- a) Majalah Tempo edisi 4 Januari 1999.
- b) Majalah Gatra edisi 6 Juni 1998.
- c) Majalah Bangkit edisi 15 November 1998.
- d) Koran Harian Suara Pembaruan edisi 19 Mei 1998.
- e) Koran Harian Republika edisi 20 Mei 1998.
- f) Koran Harian Kompas edisi 21 Oktober 1998.

3. Sumber Lisan:

- a) Tokoh MPR serta Kader Golkar tahun 1998.

4. Sumber Tulisan:

- a) Dwi Prasdi, N., dkk. (1999). Golkar Retak?. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Sumber data sekunder yaitu dokumen atau sebuah tulisan yang ditulis tidak bersamaan atau beberapa saat setelah peristiwa sejarah terjadi. Sumber ini ditulis berdasarkan bukti-bukti dari sumber pertama, kemudian sumber sekunder ini digunakan penulis sebagai penunjang dalam penelitian yang akan dibuat, adapun sumber sekunder berikut:

- 1. Tulisan dari Dwi Prasdi N, dkk. berjudul Golkar Retak? yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi.
- 2. Tulisan dari Ecip, S. berjudul Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto yang diterbitkan oleh Mizan
- 3. Tulisan dari Denny J. A. berjudul Jatuhnya Soeharto dan Trasisi Demokrasi Indonesia yang diterbitkan oleh LKIS

4. Tulisan dari Napitupulu, B. berjudul *Harakiri Politik, Tokoh Nasional & Elit Golkar* yang diterbitkan oleh RMBOOKS
5. Tulisan dari Tanjung, A. berjudul *The Golkar Way* yang diterbitkan oleh Gramedia.
6. Tulisan dari Ibnu, U. berjudul *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar* yang diterbitkan oleh Ombak
7. Tulisan dari Harianto, A. berjudul *Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Pasca-Orde Baru* yang diterbitkan oleh Penjuru Ilmu Sejati

1.6.3. Verifikasi

Verifikasi atau Kritik Sumber adalah Uji Validasi data Sejarah untuk memastikan kebenaran dari data sejarah tersebut. Verifikasi terbagi menjadi dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.³⁹

Kritik ekstern dilakukan untuk memeriksa aspek-aspek seperti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya, guna mengetahui autentisitasnya.⁴⁰ Kritik intern bertujuan untuk menguji kebenaran isi data atau sumber yang diperoleh agar sumber bisa dipercaya. Kritik intern berfungsi untuk menelaah, memahami, dan membandingkan dengan sumber-sumber lain yang telah terkumpul, sehingga dapat diambil data yang saling berkesinambungan dari berbagai sumber tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa majalah, surat kabar, dan hasil

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013, hlm. 77.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 77.

wawancara yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan proses wawancara bersama narasumber terkait. Penerapan kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan mengecek keaslian cetakan dari majalah tempo dan gatra serta surat kabar diantaranya kondisi kertas, gaya tulisan, keaslian penulis, tahun terbit, tempat terbit serta keaslian cetakan. Kondisi tersebut yang menjadi penguat bahwa majalah tempo dan gatra serta surat kabar tersebut merupakan sumber primer. Sementara penerapan kritik intern dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis terhadap isi sumber yang diperoleh, membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, lalu dapat diambil dan diperoleh menjadi sebuah sumber primer.

Peneliti melakukan kritik ekstern saat mengecek sumber primer yang diperoleh berupa terbitan majalah tempo dan gatra serta surat kabar edisi Juni hingga November 1998 yang telah didapatkan sebelumnya pada tahap heuristik. Kemudian kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti dengan mengecek keaslian cetakan dari majalah tempo dan gatra serta surat kabar yang terbit di bulan pasca kerusuhan meredam dan pemerintah berganti karena pada edisi Maret hingga Mei semua majalah yang berbau pemerintah dibredel habis. Kondisi tersebut yang dapat meyakinkan peneliti bahwa terbitan majalah tempo dan gatra serta surat kabar edisi Juni hingga November 1998 merupakan sumber primer. Adapun kritik intern dilakukan oleh peneliti saat membaca salah satu isi dari majalah tempo yang membahas mengenai transisi pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, peneliti mengamati dan menganalisis setiap tulisan-tulisan yang termuat

dalam majalah tempo tersebut untuk menguji kebenaran isi data atau sumber yang diperoleh agar sumber bisa dipercaya.

1.6.4. Interpretasi

Interpretasi adalah hasil dari tafsiran atau pemberian makna kepada fakta dan bukti sejarah. Pada dasarnya, bukti sejarah sebagai saksi atas peristiwa masa lalu hanyalah saksi bisu. Mereka tidak dapat berbicara sendiri tentang apa yang mereka saksikan dari peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, interpretasi diperlukan. Secara metodologis, interpretasi merupakan komponen penting dari proses penelitian dan penulisan sejarah secara keseluruhan. Pada tahapan ini, interpretasi terbagi menjadi dua yaitu analisis berupa menganalisis isi sumber yang telah dikumpulkan dan sintesis dengan menyatukan isi sumber yang telah diuraikan hingga menjadi satu kesatuan cerita yang harmonis dan masuk akal.⁴¹

Peneliti melakukan tahapan interpretasi melalui analisis, peneliti melakukan analisis mengenai isi dari sumber-sumber majalah, arsip, surat kabar, yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan peneliti berupa sumber-sumber yang telah diperoleh terkait dengan Peran Golkar dalam politik Indonesia tahun 1998. Peneliti berhasil melakukan analisis isi dari sumber-sumber yang telah disampaikan sebelumnya. Tahap interpretasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis serta menguraikan isi sumber-sumber yang telah diperoleh. Tahap selanjutnya melakukan sintesis yaitu tahapan menyatukan isi sumber yang telah diuraikan. Peneliti melakukan tahap ini dengan menelusuri kronik dari peran Golkar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 1998.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013, hlm. 78.

1.6.5. Historiografi

Dalam tahap historiografi, penelitian harus disusun secara objektif serta sistematis.⁴² Penulisan sejarah perlu memperhatikan aspek penting, yaitu penyusunan yang kronologis, sehingga peristiwa disajikan sesuai urutan waktu. Dalam penyajian historiografi, setidaknya harus mencakup pengantar, hasil penelitian, kesimpulan.⁴³ Penelitian ini sejalan dengan metode penelitian sejarah menurut Kontowijoyo, sebab sudah mencakup tiga bagian tersebut. Setelah melalui empat tahap sebelumnya, dari pemilihan topik, heuristic, kritik sumber, dan interpretasi, selanjutnya peneliti melakukan proses penggabungan data dari setiap sumber yang telah diperoleh. Peneliti menguraikan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga terbentuk suatu uraian yang sesuai dengan tiga bagian penting tersebut. Penelitian ini memuat lima bagian, pada bab I memuat latar belakang, pada bab II, bab III sampai bab IV memuat hasil penelitian dan bab V memuat kesimpulan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Peran Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998” yang diuraikan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian teoretis, kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan metode penelitian dan

⁴² *Ibid*, hlm 79.

⁴³ *Ibid*, hlm 80.

sistematika pembahasan. Penulis menjadikan bagian ini sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan supaya sesuai dengan pembahasan dan memiliki fokus penelitian yang jelas.

Bab II merupakan pembahasan mengenai Strategi Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998. Pembahasan pada bab II terdiri atas dua sub-bab yakni Akar Pemikiran Politik Golkar dan Siasat Golkar dalam Transisi Kekuasaan 1998 yang ditujukan supaya pembaca dapat memahami objek penelitian secara utuh dan runtut.

Bab III pada penelitian ini mengkaji Aksi Golkar dalam Politik Indonesia tahun 1998. Pembahasan pada bab III terdiri atas dua sub-bab yakni Hubungan Golkar dengan Soeharto dan Kronik Peran Golkar dalam menjatuhkan Soeharto yang merupakan intisari dari penelitian ini.

Bab IV pada penelitian ini mengkaji Dampak Aksi Golkar terhadap Politik Nasional. Pembahasan pada bab IV terdiri atas dua sub-bab yakni Dampak Pengunduran Diri Soeharto terhadap Golkar dan Peran Golkar dalam Stabilitas Politik Reformasi yang berfokus mengenai langkah-langkah yang dilakukan Golkar setelah tuntutan pelengseran Soeharto meredam.

Bab V pada penelitian ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang sudah diteliti oleh penulis dan saran terkait dengan kekurangan penelitian serta bagian daftar pustaka meliputi kumpulan referensi atau sumber yang telah digunakan oleh peneliti.